

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(P-RENJA) TAHUN 2026



KACAMATAN KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini merupakan wujud akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik di wilayah Kecamatan Kemlagi.

Dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari kreteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharapkan beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kesempurnaan dokumen dan pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Perubahan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan pada kita semua dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 16 Agustus 2026
Camat Kemlagi



Micky Socrates, S.STP. M.Si
Pembina
Nip. 19840425 200312 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	
3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026.....	36
3.2. <i>Tagging</i> Tematik... ..	42
BAB IV PENUTUP	
4.1. Catatan Penting	45
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	46
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, di mana Misi Kesatu yaitu “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026. Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kinerja Layanan Kecamatan

Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja

Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabapupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
33. Surat Keputusan Camat Kemlagi Nomor 188.4/28/416- 315/2025 tentang Tim Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 disusun secara terstruktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen Perubahan Renja ini disusun untuk menyelaraskan arah kebijakan, mengidentifikasi tantangan pelaksanaan program di sisa tahun berjalan, serta memetakan langkah-langkah strategis dalam merespons dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistem penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan .Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

- melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan;
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 4.3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja program, kegiatan, serta penyerapan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam melakukan penyesuaian (perubahan) alokasi sumber daya pada sisa tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi kinerja sampai dengan Triwulan II pelaksanaan Renja Kecamatan Kemlagi menunjukkan dinamika sebagai berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Kemlagi
2026

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2026) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)				Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		I		II				
1	2	3	4	7		8		9		12		13		16		24
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan	95,75												KECAMATAN KEMLAGI
		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100,00	7.445.600		377.300		377.300		360.000		360.000		3.855.900	KECAMATAN KEMLAGI
		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100,00	7.445.600		377.300		377.300		360.000		360.000		3.855.900	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12,00	7.445.600	3,00	377.300	3,00	377.300	3,00	360.000	3,00	360.000	6,00	3.855.900	KECAMATAN KEMLAGI
		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100,00	172.814.700		27.361.950		64.795.100		21.661.950	39,00	71.173.200	39,00	112.497.350	KECAMATAN KEMLAGI

		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IK : Jumlah laporan koordinasi	28,00	172.814.700	5,00	27.361.950	5,00	64.795.100	5,00	21.661.950	6,00	71.173.200	11,00	112.497.350	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10,00	91.100.200			4,00	60.095.100			4,00	62.329.800	4,00	66.065.100	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8,00	23.787.250	2,00	5.613.400		200.000	2,00	5.063.400			2,00	11.126.800	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	4,00	26.495.600	2,00	17.248.550			2,00	12.098.550	1,00	5.093.400	3,00	18.830.350	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	6,00	31.431.650	1,00	4.500.000	1,00	4.500.000	1,00	4.500.000	1,00	3.750.000	2,00	16.475.100	KECAMATAN KEMLAGI
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP PD	84,32												KECAMATAN KEMLAGI
		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase Realisasi Anggaran PD, 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,10 94,17	2.667.870.410		716.160.753		758.750.882		481.019.321	40,54	580.057.664	40,54	1.430.616.963	KECAMATAN KEMLAGI

		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90,10	4.499.000		2.100.000		730.000		769.700		329.850		1.798.400	KECAMATAN KEMPLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	1.599.000	1,00	200.000	1,00	400.000	1,00	200.000	1,00		2,00	498.800	KECAMATAN KEMPLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20,00	2.900.000	6,00	1.900.000	4,00	330.000	6,00	569.700	4,00	329.850	10,00	1.299.600	KECAMATAN KEMPLAGI
		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100	2.445.193.000		666.671.813		710.724.192		447.594.285		533.784.481		1.304.052.760	KECAMATAN KEMPLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16,00	2.445.193.000	16,00	666.671.813		710.724.192	16,00	447.594.285		533.784.481	16,00	1.304.052.760	KECAMATAN KEMPLAGI
		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100	25.678.600		6.780.700				6.549.000				10.934.920	KECAMATAN KEMPLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	4.841.500										4.385.920	KECAMATAN KEMPLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2,00	20.837.100	1,00	6.780.700			1,00	6.549.000			1,00	6.549.000	KECAMATAN KEMPLAGI
		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100	41.640.900		8.590.600		7.693.900		1.159.900		9.938.105		22.069.055	KECAMATAN KEMPLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	11.250.000	1,00	172.800	2,00	3.596.200	1,00	171.500	2,00	3.375.000	3,00	6.351.500	KECAMATAN KEMPLAGI

		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	6.217.500	1,00	1.242.800		1.922.700	1,00	213.400		2.951.600	1,00	5.114.600	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1,00	2.700.000	1,00	675.000		675.000	1,00	675.000		675.000	1,00	1.800.000	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1,00	15.473.400	1,00	5.000.000					1,00	2.936.505	1,00	8.702.955	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12,00	6.000.000	3,00	1.500.000	3,00	1.500.000	1,00	100.000			1,00	100.000	KECAMATAN KEMLAGI
		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	0,00	81.958.460		20.342.790		20.342.790		18.068.936		18.125.228		47.376.928	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3,00	49.149.500	3,00	12.140.550	3,00	12.140.550	3,00	9.411.017	3,00	8.783.788	6,00	23.909.409	KECAMATAN KEMLAGI
		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	32.808.960	3,00	8.202.240	3,00	8.202.240	3,00	8.657.919	3,00	9.341.440	6,00	23.467.519	KECAMATAN KEMLAGI
		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	0,00	68.900.450		11.674.850		19.260.000		6.877.500		17.880.000		44.384.900	KECAMATAN KEMLAGI

[illegible]

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan data tabel Laporan Realisasi Triwulan II, rata-rata target kinerja tercapai sesuai dengan target akan tetapi terdapat beberapa sub kegiatan yang capaian kinerja nya tidak sebanding dengan capaian kinerja anggaran yang masih rendah atau belum sesuai dengan target rencana anggaran kas sampai dengan Triwulan II, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan dengan target 90,10% terletak pada TW IV sehingga belum terdapat realisasi sampai dengan TW II karena perhitungan dilaksanakan pada TW IV dan Persentase Realisasi Anggaran dengan target kinerja sesuai rencana anggaran kas sampai dengan TW II sebesar 55% terealisasi 39,77% dengan capaian kinerja 72%, hal ini disebabkan oleh beberapa sub kegiatan yang masih belum memenuhi target antara lain :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target kinerja pada TW II sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen ranwal renja 2027 dan rancangan renja 2027 dapat terealisasi 100%, namun untuk target anggaran pada TW II sebesar Rp. 600.000,00 masih terealisasi Rp. 200.000,00 dengan capaian 33% dikarenakan terdapat perjalanan dinas luar kota yang belum dapat terealisasikan akibat belum tersedianya rekening belanja perjalanan dinas luar kota.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan indikator kinerja dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target kinerja 10 laporan yaitu 6 Laporan Realisasi Anggaran , 1 Laporan LKjIP , 1 Laporan Keuangan , 1 Laporan LKPJ , 1 laporan evaluasi renja triwulan I dapat terealisasi 100%, namun untuk target anggaran sebesar Rp. 2.230.000,00 terealisasi Rp. 899.550 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 40% karena terdapat perubahan rencana kegiatan yang awalnya untuk peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja berubah menjadi pengadaan hddisk guna menunjang penyimpanan arsip digital.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja terletak pada TW IV karena perhitungan dilaksanakan pada TW IV, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 1.377.396.005,00 terealisasi sebesar 981.378.766,00 dengan capaian 71% disebabkan oleh estimasi pejabat eselon IV sebanyak 2 orang dan pejabat eselon III sebanyak 1 orang yang masih belum terisi serta terdapat akses 4%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan target kinerja 1 paket dapat terealisasi 1 paket dengan capaian 100% namun untuk target anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 2.936.505,00 dengan capaian kinerja anggaran 59% karena terdapat alat tulis kantor yang masih dalam proses pengadaan serta terdapat efisiensi pengadaan barang akibat hasil dari negosiasi antara pejabat pengadaan dengan penyedia.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 6 laporan terealisasi 1 laporan dengan target anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000,00 dengan capaian kinerja anggaran 3% dikarenakan belum terdapat pengajuan perjalanan dinas semenjak diberlakukan perpres 72 tahun 2025 dimana perjalanan dinas dibagi atas pelaksanaan kegiatan 5 jam dan 8 jam serta BBM bagi kegiatan dibawah 5 jam.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target kinerja 6 laporan dapat terealisasi 6 laporan dengan capaian kinerja 100% namun target anggaran sebesar Rp. 24.281.100,00 terealisasi Rp. 18.194.164,00 dengan capaian kinerja anggaran 75% dikarenakan efisiensi penggunaan sumber daya air dan listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, target kinerja 1 unit dapat terealisasi 1 unit dengan capaian kinerja 100% namun target anggaran sebesar Rp. 17.790.000,00 dapat terealisasi Rp. 24.757.500,00 dikarenakan pembayaran bbm dilakukan bulan berikutnya sesuai dengan surat tagihan sedangkan anggaran kas nya terletak di setiap bulannya.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target kinerja 1 unit dapat terealisasi 1 unit dengan capaian kinerja 100% namun target anggaran sebesar Rp. 8.674.850,00 dapat terealisasi Rp. 5.297.500,00 dengan capaian kinerja anggaran 61% dikarenakan terdapat perubahan rekening belanja jasa tenaga kebersihan menjadi belanja jasa tenaga cleaning service sehingga penyerapan dapat dilaksanakan mulai bulan mei setelah pergeseran anggaran selesai dilaksanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan table laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II berikut ini program/kegiatan/sub kegiatan yang tercapai baik kinerja maupun anggaran sesuai dengan target, antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target kinerja sebanyak 3 paket dapat terealisasi 3 paket dengan capaian kinerja 100% dan rencana anggaran sampai dengan TW II sebesar Rp. 3.769.000 dapat terealisasi 3.546.500 dengan capaian 94%, hal ini wajar karena terdapat selisih antara harga beli dengan harga standar satuan harga pada DPA 2026.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket dapat terealisasi 1 paket dengan capaian kinerja 100% dan rencana anggaran sebesar Rp. 3.165.500 dapat terealisasi 3.165.000 dengan capaian kinerja anggaran 99,98%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja 1 dokumen dapat terealisasi 1 dokumen dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.350.000,00 terealisasi Rp. 1.350.000,00 dengan capaian kinerja anggaran 100% hal ini dikarenakan pada saat pembagian anggaran kas sudah menggunakan harga sesuai harga beli sehingga bisa terserap 100%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target kinerja 12 unit dapat terealisasi 12 unit dengan capaian kinerja 100% dan rencana anggaran sebesar Rp. 4.470.000,00 dapat terealisasi Rp. 4.470.000,00 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 100%
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar dengan target kinerja 100% dapat terealisasi 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan dapat terlayani sesuai dengan standar pelayanan dan target anggaran sebesar Rp. 754.600,00 terealisasi Rp.720.000,00 dengan capaian kinerja anggaran 95% karena terdapat selisih harga antara harga beli dengan harga pada standar satuan harga.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Nonperizinan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan dengan target kinerja 6 laporan dapat terealisasi 6 laporan dengan capaian kinerja 100%.

- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan indikator Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dengan target 100% dapat terealisasi 110%, hal ini didapat dari rencana pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di Triwulan II sebanyak 6 laporan tetapi terealisasi 7 laporan.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa target kinerja sebanyak 2 dokumen dapat terealisasi 2 dengan capaian kinerja 100%, dokumen yang tersusun dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa antara lain fasilitasi batas desa dan monitoring & evaluasi pemerintah desa terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes TA. 2025, rencana anggaran sebesar Rp. 5.613.400,00 dapat terealisasi Rp. 5.063.400,00 dengan capaian kinerja anggaran 87%, hal ini masih wajar dikarenakan efisiensi pengadaan barang akibat hasil negosiasi harga antara penyedia dengan pejabat pengadaan barang/jasa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum target kinerja 2 dokumen terealisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%, 2 dokumen tersebut antara lain pemantauan wilayah / pembinaan yang dilaksanakan oleh tim forkopimcam guna meningkatkan kondusifitas wilayah kecamatan kemlagi. Rencana anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 terealisasi Rp. 8.250.000,00 dengan capaian kinerja 92%, hal ini karena pembayaran honor kapolsek menunggu SK Pengangkatan keluar namun untuk pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan informasi pada laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II terdapat 3 sub kegiatan yang capaian kinerja atau capaian kinerja anggaran melebihi dari target yang ditetapkan, antara lain :

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa**

- Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)
- Target Kinerja (Fisik) s/d Triwulan II: 2 Dokumen
- Realisasi Kinerja (Fisik) s/d Triwulan II: 3 Dokumen
- Capaian Kinerja: 150,00%
- Rencana Anggaran sebesar Rp. 17.248.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.191.950,00 capaian kinerja anggaran sebesar 99,67%

Realisasi kinerja 3 dokumen yaitu asistensi usulan desa (pra musrenbang), kegiatan musrenbang serta pelatihan BUMDes yang sebetulnya akan dilaksanakan pada TW III namun dilaksanakan pada TW II karena terdapat penilaian peningkatan BUMDes oleh Kementrian Desa sehingga dilaksanakan bimtek penyusunan laporan keuangan pada bulan April sekaligus monev keterisian data penilaian peningkatan BUMDes.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**

- Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)
- Target Kinerja s/d Triwulan II: 4 Dokumen
- Realisasi Kinerja s/d Triwulan II: 4 Dokumen
- Capaian Kinerja: 100,00%
- Rencana anggaran sebesar Rp.60.095.100,00 dapat terealisasi Rp. 62.329.800,00 dengan capaian kinerja 104%

Terdapat kelebihan capaian kinerja anggaran sebesar 4% karena terdapat tun-tuan akan pencairan honorarium pejabat pengadaan barang/jasa serta hono-rarium PPTK.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

- Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
- Target Kinerja s/d Triwulan II: 3 laporan
- Realisasi Kinerja s/d Triwulan II: 3 laporan
- Capaian Kinerja: 100%

- Rencana anggaran sebesar Rp.16.404.480,00 dapat terealisasi Rp. 17.999.359,00 dengan capaian kinerja anggaran 110%

Kelebihan 10% atas capaian kinerja anggaran dikarenakan terdapat realisasi upah ke 13 dan ke 14 yang mana belum masuk dalam perencanaan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Berdasarkan analisis data Laporan Realisasi Kinerja Triwulan II, berikut adalah **faktor-faktor penyebab** tidak tercapainya, terpenuhinya, serta melebihi target kinerja program/kegiatan:

a. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja / Anggaran

Beberapa sub-kegiatan mencatatkan realisasi anggaran di bawah target akibat faktor-faktor berikut:

- Terdapat pengadaan barang yang masih dalam proses pengadaan
- Efisiensi penggunaan sumber daya air dan listrik
- Minimnya pengajuan perjalanan dinas semenjak diberlakukan perpres 72 tahun 2025 yang mana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan waktu pelaksanaan rapat 5 jam, 8 jam dan yang dibawah 5 jam mendapatkan reimburse BBM, walaupun anggaran belum terserap sesuai dengan target namun pelaksanaan koordinasi atau konsultasi tetap berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan bagian di kecamatan kemlagi
- Terdapat estimasi pejabat struktural yang masih kosong sampai dengan triwulan II yaitu 1 orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV serta acrees 4%

b. Faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja

- Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala
- Terdapat koordinasi yang baik antar seksi, desa maupun dinas terkait dalam pelaksanaan koordinasi / fasilitasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, masyarakat dan trantibum
- Terdapat perencanaan yang sesuai sehingga sebagian besar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan timeline

c. Faktor Penyebab Melebihi Target Kinerja

- Terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan yaitu pelatihan BUMDes dikarenakan terdapat penilaian peningkatan BUMDes yang dilaksanakan oleh seluruh desa se-Kecamatan Kemlagi pada bulan Mei sehingga membutuhkan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi keterisian data yang mendukung penilaian peningkatan BUMDes
- Terdapat realisasi upah ke 13 dan ke 14 atas gaji PPPK Paruh Waktu yang belum direncanakan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
- b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
- d. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab yang teridentifikasi dari laporan realisasi Triwulan II, berikut adalah kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan target kinerja tercapai:

- Mensosialisasikan kembali ketentuan kelengkapan pengajuan SPPD sesuai dengan perpres nomor 72 tahun 2025
- Melakukan penyesuaian target pada Renja Perubahan 2026 sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan
- Melaksanakan rasionalisasi pos belanja yang kurang efektif dan berpotensi menjadi SiLPA, untuk selanjutnya dialihkan secara akuntabel pada program strategis nasional dan program prioritas di RPJMD 2025-2029.

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 1. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di kecamatan Kemlagi melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Kemlagi secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Masjid Baiturrahman	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1. Ekor Hewan Qurban Idul Adha	Hibah Sapi untuk 1 Desa

BAB III

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja keuangan Kecamatan Kemlagi sampai dengan Triwulan II yang masih rendah, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kemlagi untuk Tahun Anggaran 2026, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, serta penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026

Pada Perubahan rencana Kerja 2026 ada beberapa penambahan dan pengurangan anggaran di beberapa Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bertambah Rp. 113.700,00 dikarenakan terdapat perubahan rencana kegiatan pada sub evaluasi kinerja yang awalnya diperuntukkan guna peningkatan kapasitas terkait evaluasi kinerja berbasis elektronik menjadi pengadaan harddisk external yang diperuntukkan sebagai penyimpanan arsip digital bagi dokumen perencanaan dan keuangan,
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan bertambah sebesar Rp. 44.731.000 yang direncanakan untuk penambahan 50% TPP ke-13 dan penambahan pajak gaji sesuai tarif TER.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp. 8.660.700 yang digunakan untuk jasa iklan dan penambahan pengadaan laptop guna meningkatkan sarana pelayanan publik
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang Rp. 2.642.408,00, yang diperuntukkan guna menambah daya listrik dan penambahan upah 13 dan 14 bagi PPPK Parwaktu
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah Rp. 1.380.000,00 karena terdapat 2 printer yang memerlukan pemeliharaan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berkurang Rp. 4.149.108,00 akibat pengurangan belanja perjalanan dinas yang belum terserap dan dipusatkan pada satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dikarenakan minimnya pengajuan SPPD.

TABEL 3.1. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kecamatan Kemlagi

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		ANGGARAN		TAMBAH (KURANG)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
7.01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,10%	90,10%	2,742,864,000	2,820,111,400	77,247,400
		Persentase Realisasi Anggaran PD	94,17%	94,17%			
7.01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90,10%	90,10%	4.499.000	4.612.700	(113.700)
7.01.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.599.000	1.599.000	-
7.01.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	2,900,000	3.013.700	(113.700)
7.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	2,492,864,000	2,492,864,000	44.731.000
7.01.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2,445.193.000	2,489.924.000	44.731.000
7.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	67.319.600	75.980.300.00	8.660.700

7.01.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.841.500	4.841.500	-
7.01.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	20.837.100	23.155.550	2.318.450
7.01.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	11.250.000	11.250.000	
7.01.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	6.217.500	6.217.500	-
7.01.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000	9.752.800	7.052.800
7.01.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.473.400	15.470.750	(2.650)
7.01.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5 Laporan	6.000.000	5.292.200	(707.800)
7.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	81.958.460	84.600.868	2.642.408
7.01.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.149.500	50.196.908	1.047.408

7.01.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.808.960	34.403.960	1.595.000
7.01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	68.900.450	70.280.450	1.380.000
7.01.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	37.187.600	37.187.600	-
7.01.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	27.242,850	27.242,850	
7.01.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	13 Unit	4.470.000	5.850.000	1.380.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%	97.50%	7.445.600	7.445.600	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	7.445.600	7.445.600	-
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	7.445.600	7.445.600	-

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	28 laporan	29 laporan	172.814.700	168.665.592	(4.149.108)
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	23.787.250	21.787.250	(2.000.000)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	26.495.600	26.501.192	5.592
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	31.431.650	31.431.650	-
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	10 Dokumen	91.100.200	88.945.500	(2.154.700)
PAGU ANGGARAN					2.848.130.710	2.901.509.510	53.378.800

3.2. Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Adapun daftar tagging subkegiatan dilingkup Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	ANGGRAN PERUBAHAN 2025										
			KAB U PATE N LAYA K ANAK	KABU P ATEN SEHA T	SPM	STU N TING	KEMI SKIN A N EKS RE M	S D G' S	RA N HA M	GENDER	KU M UH	INFRASTR U KTUR	VISI MISI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan								2.725.398.318			2.725.398.318
		Persentase Realisasi Anggaran PD								2.725.398.318			2.725.398.318
7.01.01.2. 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%								4.612.700,00			4.612.700,00
7.01.01.2. 0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								1.599.000,00			1.599.000,00
7.01.01.2. 0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3.013.700,00			3.013.700,00
7.01.01.2. 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah								2.489.924.000,0 0			2.489.924.000,00
7.01.01.2. 0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								2.489.924.000,0 0			2.489.924.000,00
7.01.01.2. 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar								75.980.300.00			75.980.300.0 0
7.01.01.2. 0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								4,841,500.00			4,841,500.00

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								23.155.550,00			23.155.550,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								11.250.000			11.250.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								6.217.500			6.217.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								9.752.800,00			9.752.800,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan								15.470.750,00			15.470.750,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								5.292.200,00			5.292.200,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar								84.600.868,00			84.600.868,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								50.196.908,00			50.196.908,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								34.403.960,00			34.403.960,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar								70.280.450,00			70.280.450,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								37,187,600,00			37,187,600,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								27.242.850,00			27.242.850,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								5.850.000,00			5.850.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan								7.445.600,00			7.445.600,00

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti								7.445.600.00			7.445.600.00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan								7.445.600.00			7.445.600.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti								168.665.592,00			168.665.592,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi								168.665.592,00			168.665.592,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								21.787.250			21.787.250
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								26.501.192.00			26.501.192.00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								31.431.650.00			31.431.650.00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								88.945.500.00			88.945.500.00
JUMLAH										2.901.509.510.00			2.901.509.510.00

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Kemlagi dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2026, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Kemlagi.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-

undangan;

- g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026

- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

4.3. Rencana TindakLanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.



Mojokerto, 16 Agustus 2026
Camat Kemlagi

Nicky Socrates, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 198404252003121001